

PENDAMPINGAN GOVERNANSI CERDAS MELALUI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA DIGITAL

SUPPORTING SMART GOVERNANCE THROUGH THE USE OF DIGITAL VILLAGE INFORMATION SYSTEMS

Yuli Tauvani¹⁾, M. Ilham²⁾, Karlina Rahayu³⁾, Maratun Saadah⁴⁾

^{1,2,3}Institut Agama Islam Muhammad Azim

⁴Universitas Jambi

¹Email: ivantauvani@gmail.com

Received: January 28, 2025

Accepted: March 08, 2025

Published: May 26, 2025

Abstrak: Pengabdian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan praktis dalam penerapan OpenSID oleh Pemerintah Desa Singoan Kabupaten Batanghari melalui pendampingan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Desa Cerdas dengan perspektif kapasitas manajerial yang dinamis. Pemerintah Desa telah mengidentifikasi dua isu utama yang harus dibenahi agar pengembangan tata kelola desa cerdas dapat tercapai. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur desa dalam dua area utama, yaitu kapasitas manajerial yang dinamis dan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan OpenSID serta memahami potensi pencapaian tata kelola desa cerdas dengan fitur-fitur OpenSID. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR). Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sosialisasi urgensi SID dalam mewujudkan Tata Kelola Desa Cerdas. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan tentang pentingnya SID bagi Pemerintah Desa Muaro Singoan. Tim juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada Pemerintah Desa dalam mengelola Sistem Informasi Desa melalui SID. Terakhir, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Muaro Singoan mengenai pemahaman pemanfaatan SID dalam melayani masyarakat.

Kata Kunci: *E-Government, Tatakelola Cerdas, Sistem Informasi Desa.*

Abstract: *This service aims to solve practical problems in the implementation of OpenSID by the Singoan village government in Batanghari Regency through assistance in the implementation of the principles of Smart Village Governance with a dynamic managerial capacity perspective. The village government has identified two key issues that must be addressed for the development of smart governance to be achieved. Consequently, this community service activity will focus on enhancing the capacity of village officials in two key areas: dynamic managerial capacity and the ability of the community to operate OpenSID and understand the potential for achieving smart village governance with OpenSID features. We employ the Participatory Action Research (PAR) method. The stages of activities carried out to achieve the goal are socialization of the urgency of SID in realizing Smart Village Governance. The activity was continued with training on the importance of SID for the Muaro Singoan Village Government. The team*

also provided assistance and training to the Village Government in managing the Village Information System through SID. Finally, socialization was carried out to the Muaro Singoan Village community regarding the understanding of the use of SID in serving the community.

Keywords: *E-Government, Smart Governance, Village Information System.*

PENDAHULUAN

Pengabdian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah praktis dalam penerapan OpenSID oleh pemerintah desa di Kabupaten Batanghari melalui pendampingan penerapan prinsip *Smart Governance* Desa dengan pespektif kapasitas manajerial dinamis. Desa mengalami transisi yang masif selama satu dekade terakhir sebagai konsekuensi dari berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa tersebut memberikan otonomi luas bagi Desa untuk melaksanakan pemerintahan secara mandiri dan berdaya dengan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki melalui Dana Desa (Saadah, *et. al.*, 2021).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hak otonom tersebut, maka pemerintah desa diwajibkan untuk menyampaikan rencana dan realisasi pembangunan, rencana dan realisasi kerja serta sumber dan jumlah pendapatan Desa kepada masyarakat desa dan negara (Suharno, *et. al.*, 2020). Penyampaian informasi ini harus dilakukan melalui layanan informasi yang dapat diakses secara luas dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Undang-Undang Desa juga mewajibkan desa untuk melaporkan informasi Desa secara digital melalui *platform* Sistem Informasi Desa (SID)(Saadah, *et. al.*, 2024). Mekanisme ini diatur pula dalam Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa SID merupakan bagian integral dalam penerapan regulasi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Undang-Undang tersebut memberikan kewajiban bagi pemerintah desa untuk menggunakan SID yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten. Penggunaan SID selain sebagai pemenuhan tuntutan Undang-Undang, juga dapat menjadi enabler bagi Pemerintah Desa untuk melibatkan segenap

masyarakat desa secara transparan, inklusif dan akuntabel dalam perencanaan pembangunan.

Desa dengan hak otonomnya juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah administratifnya. Kemudian, Pemerintah Desa juga perlu mengelola perangkat desa sebagai bentuk otonomi atas manajemen birokrasinya, mulai dari pemetaan kebutuhan, pengumuman pendaftaran perangkat desa, seleksi di tingkat desa, hingga manajemen kepegawaian lainnya.

Ketiga fungsi utama Pemerintah Desa tersebut seperti layaknya pemerintahan lain di negara demokrasi semestinya melibatkan sebanyak mungkin partisipasi dari berbagai macam pemangku kepentingan. Pelibatan ini dikenal luas dalam kajian administrasi publik sebagai *governance*.

Pencapaian fungsi pemerintahan desa sesuai dengan prinsip governance merupakan kondisi ideal yang diharapkan Undang-Undang. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi menjadikan pemerintahan yang semula berorientasi pada peran pemerintah sebagai aktor tunggal, bergeser menuju tata kelola pemerintahan kolaboratif (Lee-Geiller & Lee, 2019).

Sehingga penggunaan istilah *smart governance* atau governansi cerdas pada kajian ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi guna mencapai tiga fungsi governansi tersebut. SID digital diyakini dapat memungkinkan terjadinya governansi cerdas dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, manajemen birokrasi yang efisien dan proses kebijakan publik yang efektif.

Pada perkembangannya, Pemerintah Kabupaten di banyak daerah belum menyediakan platform SID sebagaimana seharusnya. Kebutuhan SID yang mendesak membuat pengembang teknologi menyediakan platform SID secara bebas. Salah satu *platform* SID yang masif digunakan adalah OpenSID.

Platform ini terbukti dapat menjadi enabler digital untuk mewujudkan governansi cerdas dengan beragam fitur seperti layanan mandiri, presensi pegawai, kependudukan, keuangan, analisis, pertanahan dan banyak lainnya (Kusdarini, 2019; Anshari, *et. al.*, 2019).

Pemerintah Kabupaten Batanghari belum mengembangkan SID yang secara khusus diperuntukkan bagi Desa yang ada di Kabupaten Batanghari, padahal terdapat 110 Desa di Kabupaten Batanghari. Tercatat hanya tiga Desa yang sudah mendaftar menjadi pengguna, meskipun belum aktif, artinya data dan informasi desa belum diunggah kedalam SID dan belum terhubung ke Kemendes. Salah satu desa yang telah memiliki SID yaitu Desa Muaro Singoan, di Kecamatan Muara Bulian.

Berdasarkan diskusi dengan Camat Muara Bulian, mereka telah memiliki Program Remaja Digital Desa yang dicanangkan untuk duplikasi SID di satu desa lainnya di Kecamatan Muara Bulian. Desa tersebut memeliki kedekatan historis, kultur dan kebudayaan dengan Desa Singoan, dan berada pada cekungan Sungai Batanghari, yaitu Desa Olak. Desa tersebut lainnya saat ini tengah dalam tahap inisiatif untuk menduplikasi SID Desa Singoan melalui penerapan hal serupa. Namun program tersebut belum menghasilkan output yang signifikan. Sehingga pemerintah Kecamatan berharap pendampingan ini dapat dilakukan pada desa lainnya secara serentak.

Masalahnya, penerapan di Singoan belum mampu mewujudkan prinsip governansi cerdas atau Smart Governance. Pemerintah Desa membeli hosting, domain dan merenovasi ruang pelayanan desa menjadi lebih ramah pengunjung. Padahal, perubahan atau transformasi digital akan lebih optimal jika aspek intangible seperti kemampuan sumber daya manusia dan kesadaran digitalisasi masyarakat telah terpenuhi. Hasilnya, SID digital di Desa Muaro Singoan belum dapat mewujudkan cita – cita governansi Desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di desa muaro Muaro Singoan dan Desa Olak ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menerakan smart *governance* dengan OpenSID sekaligus memberdayakan masyarakat sebagai pengguna layanan. Sehingga, metode pelaksanaan pengabdian yang paling tepat untuk dilakukan adalah metode *Participatory Action Research* (PAR).

Metode PAR dianggap tepat dikarenakan metode ini memungkinkan adanya kolaborasi tim pengabdian dan mitra pengabdian untuk menyelidiki masalah dan mengambil tindakan untuk membawa perubahan sosial (Oliveira, 2023). Masalah yang dihadapi oleh mitra juga hanya dapat diselesaikan jika mitra mau meningkatkan kapasitasnya dan mentransformasikan pemanfaatan SID untuk goevrnansi, hal ini sejalan dengan argument (Doucet, *et., al.*, 2022).

Metode PAR yang diusulkan merupakan jenis PAR eksplanatif yang memungkina tim pengabdian untuk memfasilitasi masyarakat dalam menganalisis masalah, solusi dan kebutuhan mereka sebelum dilakukan aksi transformatif. Dalam pandangan PAR Pengabdian, pemberdayaan bukan merupakan solusi, namun merupakan cara atau pendekatan untuk melakukan aktivitas solutif. Pendampingan penerapan SID dilakukan sebagai upaya untuk membuat masyarakat mandiri, bukan ketergantungan dengan tim Pengabdian. Sehingga, perubahan sosial dalam bentuk penerapan prinsip governansi cerdas akan dapat terealisasi.

Karena PAR mengharuskan seluruh kegiatan pemberdayaan dilakukan secara bersama dengan mitra yang akan diberdayakan (Gashi, *et., al.*, 2023), maka pengabdian ini memastikan partisipasi mitra dalam setiap tahapan. Selain itu, kegiatan PKM ini dilakukan sesuai dengan siklus hidup PAR yang terjadi secara simultan dan terus menerus, hal ini dilakukan agar proses perubahan terjadi secara berkelanjutan. Sehingga, Pengabdian ini akan dilakukan sesuai siklus PAR dan menjamin partisipasi masyarakat sebagai.

Kegiatan pemberdayaan ini akan melibatkan seluruh aktor pentahelix dalam tata Kelola pemerintahan yaitu pemerintah Kabupaten Batanghari, Kecamatan Muara Bulian dan Pemerintah di dua (2) Desa selaku pemangku kebijakan yang akan melanjutkan kegiatan pemberdayaan di masa yang akan datang. Selanjutnya aktor swasta yaitu Komunitas OpenDesa selaku pengembang.

Kemitraan ini dapat berlanjut jika kedua belah pihak (pemerintah Desa dan OpenDesa) saling mengenal dan mengetahui kebutuhan masing – masing di masa yang akan datang. Kemudian, kemitraan juga akan melibatkan masyarakat setempat Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang terdiri dari tim

pengabdian dan mahasiswa sebagai fasilitator dan pendamping kegiatan pemberdayaan, serta pihak media massa dalam hal ini Tribun Jambi sebagai media publikasi kegiatan pengabdian dan penyebaran informasi tatakelola pemerintahan cerdas dengan OpenSID.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Desa sebagaimana pemerintahan lainnya dalam negara demokrasi, seharusnya melibatkan sebanyak mungkin partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan tersebut dikenal luas dalam kajian administrasi publik dengan istilah tata kelola Terwujudnya fungsi pemerintahan desa sesuai dengan asas tata kelola merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut, penerapan tata kelola berbasis teknologi menjadikan pemerintahan yang semula berorientasi pada peran pemerintah sebagai aktor tunggal bergeser ke arah tata kelola kolaboratif.

Maka, penggunaan istilah smart governance atau intelligent governance dalam kajian ini mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan ketiga fungsi tata kelola tersebut. SID digital diyakini mampu mewujudkan tata kelola cerdas melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan birokrasi yang efisien, dan proses kebijakan publik yang efektif.

Pemerintah Desa sebelumnya telah berlangganan SID digital, membeli hosting, domain, dan merenovasi ruang pelayanan desa agar lebih ramah pengunjung. Padahal, perubahan atau transformasi digital akan lebih optimal apabila aspek intangible seperti kemampuan sumber daya manusia dan kesadaran digitalisasi masyarakat telah terpenuhi. Akibatnya, SID digital di Desa Muaro Singoan belum mampu mewujudkan cita-cita tata kelola pemerintahan desa. Desa juga telah melewati masa aktif berlangganan SID Digital berikut hosting dan domainnya serta belum dianggarkan untuk perpanjangan mengingat besarnya prioritas pembangunan lain di Desa.

Selanjutnya, pemerintah desa belum mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa baik dalam mengoperasikan SID maupun dalam menginterpretasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang cerdas dengan

fitur-fitur SID. Selain itu, pemerintah desa juga belum mampu mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi pengenalan manfaat SID bagi peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan atau pelatihan penggunaan SID untuk mengakses pelayanan.

Selain itu, terdapat satu desa tetangga yang juga ingin menerapkan SID. Terdapat lima desa lainnya di area tersebut. Namun, karena keterbatasan sumber daya, maka kami menseleksi satu desa lainnya untuk bergabung bersama Desa Singoan menjadi desa dampingan. Desa yang telah berhasil kami seleksi yaitu Desa Olak, mereka telah memiliki kader digital yang mendukung penerapan SID digital di Desa tersebut.

Pengabdian ini mentransfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kepada mitra berupa pengetahuan tentang manfaat penggunaan SID dalam tata kelola pemerintahan, kemampuan instalasi SID secara online, kemampuan pengisian administrasi desa melalui SID, kemampuan pemberian layanan publik melalui SID, pemahaman layanan administrasi publik secara online kepada masyarakat. Selain itu, layanan ini juga akan mentransfer pengetahuan tentang manfaat SID dan pemanfaatannya kepada masyarakat Desa di Kecamatan Muara Bulian. Hal ini dilakukan agar masyarakat mandiri sesuai dengan prinsip layanan PAR.

Sebelumnya Desa Singoan telah mendapatkan pembelakan penggunaan aplikasi opensid untuk menambahkan fitur *smart governance* dari universitas Jambi. Berbekal komunikasi dengan pihak universitas jambi maka penekanan pengabdian tim IAIMA akan bertumpu pada bagaimana pemanfaatan fitur yang telah dikembangkan tersebut untuk mencapai prinsip *smart governance*.

Tim pengabdian melakukan pembelian hosting, domain dan pembayaran biaya berlangganan SID Desa Singoan yang telah habis masa berlakunya. Tim pengabdian juga melakukan pembaharuan *dashboard* OpenSID. Setelah masalah infrastruktur ini selesai, maka tim pengabdian mulai menyasar masalah kapasitas SDM perangkat desa. Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu sosialisasi mengenai urgensi SID dalam mewujudkan Tata Kelola *Smart Village*, bahwa *Smart Governance* sangat penting dalam Pemerintahan

Desa untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang cerdas dan terdigitalisasi. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan mengenai pentingnya SID bagi Pemerintah Desa Muaro Singoan guna mencapai indikator *smart governance* sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Tim pengabdian juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada Pemerintah Desa dalam mengelola Sistem Informasi Desa melalui SID, guna meningkatkan kualitas SDM atau Aparatur Pemerintah Desa Muaro Singoan. Terakhir, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Muaro Singoan mengenai pemahaman pemanfaatan SID dalam melayani masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ini melibatkan seluruh pelaku pentahelix dalam tata kelola pemerintahan, yaitu Pemerintah Kabupaten Batanghari, Kecamatan Muara Bulian dan Pemerintah Desa Muaro Singoan sebagai pemangku kebijakan yang akan melanjutkan kegiatan pemberdayaan di masa mendatang.

Selanjutnya, pelaku swasta adalah Komunitas OpenDesa sebagai pengembang OpenSID. Kemitraan ini terus berlanjut di kedua belah pihak (Pemerintah Desa dan OpenDesa) yang saat ini sudah saling mengenal dan memahami kebutuhan masing-masing di masa mendatang. Kemudian, kemitraan juga melibatkan masyarakat setempat dan perguruan tinggi yang terdiri dari tim pengabdi dan mahasiswa sebagai fasilitator dan pendamping kegiatan pemberdayaan.



Gambar 1. Pelatihan penggunaan SID Digital

Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan mengenai pentingnya SID bagi Pemerintah Desa Muaro Singoan guna mencapai indikator *smart governance* sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Tim juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada Pemerintah Desa dalam mengelola Sistem

Informasi Desa melalui SID, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau Aparatur Pemerintah Desa Muaro Singoan. Terakhir, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Muaro Singoan mengenai pemahaman pemanfaatan SID dalam melayani masyarakat.

Smart Governance, semakin termotivasi untuk mencoba fitur-fitur lain dalam SID sedangkan aparat desa termotivasi untuk membuat peta jalan implementasi *smart governance* desa. Perubahan sikap langsung terlihat sejak kegiatan pertama, masyarakat merasa mudah mengakses layanan dengan SID. Masyarakat menyadari bahwa layanan di kantor pemerintahan lain masih memerlukan kunjungan langsung dan antri yang memakan waktu lebih lama dibandingkan mengakses layanan di Desa Singoan.

Untuk memastikan keberhasilan program, layanan ini menggunakan monitoring dan evaluasi pada tahap akhir siklus. Monitoring akan dilakukan sebanyak dua kali selama program layanan berlangsung untuk melihat apakah masih terdapat kendala dalam pengelolaan SID Kantor Desa. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa, Pemerintah Daerah Batanghari (Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa), Tim Pengabdian Masyarakat, seluruh Aparatur Pemerintah Desa, dan Perwakilan Masyarakat Desa.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan program. Melalui proses evaluasi, kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan dapat didiskusikan antara tim pelaksana dengan masyarakat atau Pemerintah, sehingga dapat ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan dari laporan evaluasi berkala adalah untuk melakukan penilaian bersama. Evaluasi berkala pertama dilakukan setiap kali selesainya suatu kegiatan, yang diharapkan dapat meningkatkan capaian kegiatan berikutnya ke tahap pengetahuan yang diinginkan. Evaluasi berkala kedua dilakukan setiap dua minggu sekali selama kegiatan berlangsung.

KESIMPULAN

Pengabdian ini pada akhirnya berdampak pada perubahan pengetahuan, sikap, mentalitas, dan keterampilan masyarakat dan aparatur desa dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa dengan SID digital. *E-government* yang mereka laksanakan lebih terfokus dengan peta jalan *smart governance*. Masyarakat menyadari bahwa pelayanan di kantor pemerintahan lain masih memerlukan kunjungan langsung dan antri yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan mengakses pelayanan di Desa Singoan. IAIMA dan aparatur Desa Singoan menyusun peta jalan penerapan smart governance melalui platform SID. Selain itu, kemitraan yang telah terjalin akan menjadi dasar bagi IAIMA untuk melaksanakan layanan lanjutan dalam aspek pengajaran dan penelitian.

Pemerintah Kabupaten perlu melakukan percepatan implementasi OpenSID sebagai media pelaporan kegiatan administrasi pembangunan di 110 desa di Kabupaten Batanghari. Desa Singoan dapat menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan SID bagi desa-desa lain di Kabupaten Batanghari. Pemerintah Desa Singoan perlu melaksanakan pelatihan pengelolaan SID bagi seluruh perangkat desa, mengingat masing-masing fungsi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan SID.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini sepenuhnya dibiayai oleh Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2024 dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Kementerian Agama Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- De Oliveira, B. (2023). Participatory action research as a research approach: advantages, limitations and criticisms. *Qualitative Research Journal*, 23(3), 287–297. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/QRJ-08-2022-0101>
- Doucet, M., Pratt, H., Dzhenganyin, M., & Read, J. (2022). Nothing About Us Without Us: Using Participatory Action Research (PAR) and arts-

- based methods as empowerment and social justice tools in doing research with youth 'aging out' of care. *Child Abuse & Neglect*, 130, 105358. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chab.2021.105358](https://doi.org/10.1016/j.chab.2021.105358)
- Gashi, S., Kaspar, H., & Holtforth, M. G. (2023). Personal benefits of older adults engaging in a participatory action research (PAR) project. *Journal of Aging Studies*, 67, 101192. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaging.2023.101192>
- Kusdarini, H. J. R. E. P. K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabukabu Padang Panjang. *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)*, Vol 8, No 1 (2019): June 2019, 24–37. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/265/225>
- Lee-Geiller, S., & Lee, T. (David). (2019). Using government websites to enhance democratic E-governance: A conceptual model for evaluation. *Government Information Quarterly*. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.003>
- Ningsih, R. M., Suharno, S., & Harimurti, F. (2020). PENGARUH PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA DESA TERHADAP REALISASI PENGELOLAAN APBDes (Studi Kasus Pada Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 17(2).
- Pagiling, L., Nur, M. N. A., Galugu, I., & Lolok, A. (2019). Optimalisasi Sistem Pembuatan Surat Pelayanan Masyarakat Desa berbasis Online Di Kabupaten Konawe Selatan menggunakan OpenSID. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT)*, 1(1).<http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPMIT/article/view/9669/6954>
- Saadah, M. A., Erida, E., & Syeftiani, T. (2024). *Transforming Village Governance: What does it Take to Turn into Digital BT - Proceedings of the 2nd International Conference on Democracy and Social Transformation (ICON-DEMOST 2023)*. 119–123. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-174-6_21
- Saadah, M., Sampoerno, M. N., Triansyah, Z., & Chaniago, F. (2021). Pengembangan Pengelolaan Pariwisata oleh Badan Usaha Milik Desa di Jambi. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.51135/kambotivol1iss2pp182-192>